

# Berisiko jadi Temuan

## Dana Aspirasi DPRD Sambas

**PONTIANAK**—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat menyatakan dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sambas berisiko menjadi temuan penyimpangan. Pihaknya juga sudah melakukan pemetaan tentang risiko akibat pengaturannya aspirasi yang dinilai tanpa melalui perencanaan matang.

“Dana aspirasi DPRD Kabupaten Sambas menjadi intensitas untuk dikejar. Penyusunan anggaran mestinya mengikuti mekanisme yakni musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dengan menyerap aspirasi dari bawah. Tapi anggaran ini (dana aspirasi, red) masuk menjelang ketuk palu. Ini berisiko, anggaran masuk menjelang akhir penetapan APBD,” kata Kepala Sub Auditorat Kalbar I BPK RI Perwakilan Kalbar Hernold Ferry

Makawimbang, Kamis (1/3) di Pontianak.

Hernold menyampaikan masalah tersebut ketika menerima audiensi DPP Laskar Anti-Korupsi Indonesia (LAKI) yang menyoroti masalah dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2011. LAKI dalam kesempatan itu mendesak BPK segera melakukan audit terhadap dana aspirasi anggota DPRD Sambas.

BPK menyambut aspirasi yang disampaikan LAKI. Namun proses audit sudah mempunyai ketentuan. Jadi tidak bisa sembarangan. Karena itu, BPK memberi usul kepada LAKI jika mempunyai cukup bukti bisa melapor ke aparat penegak hukum atas dugaan tindak korupsi dalam dana aspirasi.

Hernold tidak menampik jika penetapan dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sambas terindikasi perencanaannya lemah. Maka disebut begitu berisiko. Apalagi dana aspirasi banyak dikerjakan

sendiri dalam bentuk proyek dan dengan dititip ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Bagi kami sebaiknya memperjuangkan mekanisme dari bawah. Dan yang melaksanakan harus eksekutif bukan legislatif,” katanya.

Sementara ketua DPCLAKI Kabupaten Sambas Ahyadi berharap penuh BPK dapat melakukan audit terhadap dana aspirasi anggota DPRD pada 2011. Dan pihaknya telah melaksanakan investigasi lapangan. Hasilnya, banyak ditemukan indikasi tidak maksimal dalam pembangunan tersebut. Sekaligus ada indikasi penetapan APBD di luar musrenbang, yakni penyetujuan terhadap besaran dana aspirasi.

Sementara Ketua DPP LAKI Burhanudin Abdullah menginginkan BPK dapat mengaudit terhadap seluruh dana aspirasi dewan di seluruh Kalbar. Agar dewan tidak menjalankan fungsi lain, yakni menjadi pelaksana proyek dari dana aspirasi. (*stm*)